



Evaluasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024

Samto^{1*}, Nabila Putri Andira², Intan Imam Sutanto³, Yani Susetyo⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama, Indonesia

¹email: samto080865@gmail.com; ²email: nabillaputri8254@gmail.com; ³email: sutanto.intanimam@gmail.com; ⁴email: yani110509@gmail.com

Jl. Tegalsari Raya No.102, Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: samto080865@gmail.com

Abstract.

The purpose of this study is to analyze the financial performance of the Cilacap Regency Government during the 2022–2024 period. Research on local government financial performance in Indonesia has largely focused on single-ratio analysis or short timeframes, leaving a gap in multidimensional and longitudinal assessments of fiscal health. This study addresses this gap by evaluating the financial performance of the Cilacap Regency Government across five fiscal dimensions effectiveness, efficiency, fiscal independence, expenditure alignment, and growth using Budget Realization Report (LRA) data from 2022–2024. Based on a descriptive-quantitative design, the findings indicate that revenue realization consistently exceeded budget targets (>100%), placing Cilacap Regency in the highly effective category. However, expenditure consistently exceeded total revenue (efficiency ratio >100%), indicating suboptimal expenditure control. Fiscal independence remains low (27–30%), reflecting a high dependence on intergovernmental transfer funds such as the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). Expenditure composition is dominated by operating expenditures rather than capital investment, potentially limiting long-term development capacity. The growth analysis confirms a positive but moderate revenue trend. This study contributes empirical evidence on the structural fiscal challenges of districts in Indonesia and provides a multi-ratio benchmark for policy evaluation.

Keywords: regional financial ratio, fiscal independence, local government finance, budget realization.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama rentang waktu 2022–2024. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada analisis rasio tunggal atau rentang waktu yang singkat, sehingga terdapat kesenjangan dalam penilaian multidimensional dan longitudinal atas kesehatan fiskal. Studi ini menjawab kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui lima dimensi fiskal efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal, keserasian belanja, dan pertumbuhan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022–2024. Berdasarkan desain deskriptif-kuantitatif, temuan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan secara konsisten melampaui target anggaran (>100%), menempatkan Kabupaten Cilacap dalam kategori sangat efektif. Namun demikian, belanja secara terus-menerus melampaui total pendapatan (rasio efisiensi >100%), mengindikasikan pengendalian pengeluaran yang belum optimal. Kemandirian fiskal tetap rendah (27–30%), mencerminkan ketergantungan tinggi pada dana transfer antar pemerintah seperti DAU dan DAK. Komposisi belanja didominasi oleh belanja operasi dibandingkan investasi modal, yang berpotensi membatasi kapasitas pembangunan jangka panjang. Hasil analisis pertumbuhan mengkonfirmasi tren pendapatan yang positif namun moderat. Studi ini berkontribusi sebagai bukti empiris atas tantangan struktural fiskal kabupaten di Indonesia dan menyediakan tolok ukur multi-rasio untuk evaluasi kebijakan.

Kata Kunci: kemandirian fiskal, keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran

1. LATAR BELAKANG

Tata kelola keuangan daerah merupakan pilar fundamental yang menopang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diemban tanggung jawab untuk mengelola sumber daya fiskal secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah. Kapasitas pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu daerah pada gilirannya akan tercermin dalam kualitas kinerja keuangannya, yang merepresentasikan kemampuan pemerintah dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah daerah di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai persoalan struktural dalam pengelolaan keuangannya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rendahnya kapasitas fiskal mandiri daerah, tingginya proporsi ketergantungan terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat, serta belum optimalnya pengelolaan dan alokasi belanja daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun desentralisasi fiskal telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kapasitas fiskal mandiri di antara berbagai daerah.

Secara empiris, data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Pada tahun 2022, rata-rata rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota secara nasional hanya berada pada kisaran 20-30%, yang berarti lebih dari 70% pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural yang signifikan dalam kapasitas fiskal mandiri antardaerah, meskipun desentralisasi fiskal telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Kabupaten Cilacap, sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif tinggi di atas Rp 80 triliun pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Cilacap, 2023), semestinya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat. Namun demikian, Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan pengeluaran, serta dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya dari ketergantungan terhadap dana transfer.

Penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, seperti Akib et al. (2024), Sari, (2021) dan Novianty et al., (2022), umumnya hanya menganalisis satu atau dua rasio keuangan dalam rentang waktu yang singkat (satu atau dua tahun). Keterbatasan ini menyebabkan penilaian kinerja fiskal tidak menyeluruh dan tidak mampu menangkap dinamika perubahan antar tahun. Studi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis multi-rasio secara komprehensif selama periode 2022-2024, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik dan berbasis bukti mengenai kondisi fiskal Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan lima dimensi rasio keuangan daerah efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian belanja, dan pertumbuhan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk peningkatan tata kelola fiskal daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi melandasi pemahaman tentang relasi kontraktual antara prinsipal dan agen dalam pengelolaan sumber daya. Jensen dan (Jensen & Meckling, 1976) mengonseptualisasikan hubungan ini sebagai kontrak yang mewajibkan satu pihak (agen) untuk menjalankan tugas atas nama pihak lain (prinsipal) dengan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan. Dalam ranah pemerintahan daerah, masyarakat menempati posisi sebagai prinsipal yang mendelegasikan pengelolaan kekayaan publik kepada pemerintah daerah sebagai agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aspek pengelolaan keuangan secara transparan, efisien, dan dapat diaudit.

Implikasi teori agensi dalam konteks fiskal daerah adalah pentingnya mekanisme akuntabilitas yang terstruktur. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi instrumen utama pelaporan pertanggungjawaban fiskal yang memungkinkan masyarakat (prinsipal) untuk menilai kinerja pemerintah (agen) dalam mengelola sumber daya publik. Analisis rasio keuangan atas LRA merupakan alat evaluasi kinerja agen yang terukur dan objektif (Mardiasmo, 2018).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan cerminan keluaran dari pengelolaan fiskal yang menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengoptimalkan sumber penerimaan dan mengendalikan pengeluaran secara bertanggung jawab (Mahmudi, 2019). Studi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki layanan publik yang lebih berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (Halim, 2020).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari perspektif akuntansi sektor publik, efektivitas menitikberatkan pada dimensi pencapaian hasil (result-oriented), yakni sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD yang diperoleh, bertambah kuat pula sinyal mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang dimiliki wilayahnya. Formula pengukuran adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas: >100% = Sangat efektif, 90% - 100% = Efektif, 80% - 90% = Cukup Efektif, 60%–80% = Kurang Efektif; <60% = Tidak Efektif (Mahmudi, 2019).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kapabilitas pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumber daya keuangan secara optimal demi memperoleh penerimaan atau menyelenggarakan program dan layanan pemerintahan. Dimensi efisiensi berpusat pada hubungan antara masukan (*input*) dan luaran (*output*), yakni seberapa jauh pemerintah daerah dapat mewujudkan capaian tertentu dengan meminimalkan biaya tanpa mengorbankan standar kualitas layanan publik yang telah ditetapkan. Formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi: <60% = Sangat Efisien; 60%–80% = Efisien; 80%–90% = Cukup Efisien; 90%–100% = Kurang Efisien; >100% = Tidak Efisien (Halim, 2020).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai kapasitas suatu daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan primordial. Rasio ini secara inheren merefleksikan sejauh mana fiskal pemerintah daerah masih mengandalkan dukungan finansial dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Formula yang diterapkan adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintahan Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria RKKD: 0%–25% = Sangat Rendah; >25%–50% = Rendah; 50%–75% = Sedang; 75%–100% = Tinggi (Halim, 2020).

Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja mencerminkan bagaimana prioritas pemerintah daerah dalam mendistribusikan alokasi anggaran antara belanja operasi (rutin) dan belanja modal (pembangunan). Belanja operasi diukur melalui perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah, sedangkan belanja modal dihitung berdasarkan proporsi total belanja modal terhadap total belanja daerah (Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., 2024). Dari sudut pandang ideal, porsi belanja modal semestinya lebih dominan guna mendukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas daerah dalam jangka panjang, meskipun realitas di lapangan menunjukkan bahwa belanja operasi kerap mendominasi struktur anggaran.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah merupakan instrumen evaluasi kinerja fiskal yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga dan menaikkan kondisi keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini secara khusus menggambarkan laju perkembangan (growth rate) atas pendapatan, belanja, dan komponen-komponen keuangan daerah lainnya sebagai respons terhadap kebijakan fiskal yang diimplementasikan (Halim, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma deskriptif-kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara sistematis berdasarkan data numerik yang tersedia (Mahmudi, 2019; Sugiyono et al., 2022). Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini data sekunder, yang secara konkret berwujud Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024 (Sekaran & Bougie, 2020).

Teknik pengumpulan dilaksanakan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, merekam, dan menelaah dokumen-dokumen laporan keuangan daerah yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2020). Validitas data dijamin melalui triangulasi dokumen: LRA yang digunakan adalah dokumen yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dipublikasikan secara resmi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, yakni menghimpun dan menelaah dokumen laporan keuangan daerah yang relevan (Sekaran & Bougie, 2020).

Tahapan analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik analisis rasio keuangan daerah, yang secara sistematis mencakup: rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio kemandirian, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan. Rangkaian analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara holistik, baik dari sisi kapasitas penerimaan maupun kemampuan pengelolaan pengeluaran secara optimal (Halim, 2020)(Mardiasmo, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan rangkuman hasil perhitungan seluruh rasio keuangan Kabupaten Cilacap selama periode pengamatan 2022-2024.

Tabel 1. Ringkasan Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap 2022–2024

Rasio Keuangan	2022	2023	2024	Kategori
Efektivitas PAD	107,24%	102,82%	105,67%	Sangat Efektif
Efisiensi Belanja	103,31%	100,71%	100,31%	Tidak Efisien
Kemandirian Fiskal	27%	30%	30%	Rendah
Belanja Operasi	>70%	>70%	>70%	Tidak Sehat
Pertumbuhan PAD			+3,8%	Positif Moderat

Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Rasio efektivitas PAD Kabupaten Cilacap selama periode 2022–2024 secara konsisten berada di atas 100%, yaitu 107,24% (2022), 102,82% (2023), dan 105,67% (2024). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh (Mahmudi, 2019; Wibowo, 2020), ketiga angka tersebut menempatkan Kabupaten Cilacap dalam kategori “sangat efektif”.

Capaian efektivitas yang konsisten tinggi ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang berkontribusi pada capaian ini antara lain: peningkatan sistem administrasi perpajakan daerah berbasis teknologi informasi, optimalisasi retribusi sektor industri dan pariwisata yang menjadi keunggulan komparatif Cilacap, serta penetapan target anggaran yang realistis dan berbasis data historis (Firmansyah, 2022)(Yuliana, 2021)

Namun demikian, capaian efektivitas yang melampaui 100% selama tiga tahun berturut-turut perlu dianalisis secara kritis. Kondisi ini dapat mengindikasikan dua kemungkinan: pertama, kapasitas fiskal PAD yang memang kuat; atau kedua, penetapan target PAD yang terlalu konservatif (*underbudgeting*). Jika yang terjadi adalah skenario kedua, maka pemerintah daerah sesungguhnya kehilangan potensi perencanaan anggaran yang lebih optimal (Lestari, 2021) (Rahman, 2022).. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD ke depan agar target PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil yang telah dipetakan secara sistematis (Prasetyo, 2021)..

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Sari, 2021) dan (Akib et al 2024) yang menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia mampu melampaui target pendapatan, namun tantangan utama justru terletak pada sisi pengeluaran dan kemandirian fiskal.

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi Kabupaten Cilacap menunjukkan nilai di atas 100% selama tiga tahun berturut-turut: 103,31% (2022), 100,71% (2023), dan 100,31% (2024). Berdasarkan kriteria Halim (2020), kondisi ini termasuk dalam kategori “tidak efisien”, karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan.

Tren penurunan yang terlihat dari 103,31% menjadi 100,31% mengindikasikan adanya upaya perbaikan pengelolaan belanja oleh pemerintah daerah selama periode pengamatan. Meskipun demikian, angka di atas 100% tetap mencerminkan

ketidakseimbangan struktural antara penerimaan dan pengeluaran yang berpotensi menciptakan defisit fiskal riil, kecuali apabila ditopang oleh pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tingginya rasio efisiensi sebagai indikator bahwa belanja daerah relatif lebih besar bila diokomparasikan dengan pendapatan yang dihasilkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya belanja operasional seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya administrasi lainnya (Halim, 2020)(Dewi, 2022).

Tingginya belanja daerah terutama disebabkan oleh dominasi belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya administrasi perkantoran (Halim, 2007). Kondisi ini mencerminkan karakteristik umum pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki beban belanja rutin besar akibat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang signifikan. Pemerintah daerah perlu melakukan audit pengeluaran rutin secara berkala untuk mengidentifikasi pos belanja yang dapat dirasionalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Hasil ini mendukung penelitian Putra (2022) yang menggambarkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi masalah dalam efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah (Putra, 2022)(Andini, 2023).

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Cilacap selama periode 2022-2024 berada pada kisaran 27%-30%: tahun 2022 sebesar 27%, tahun 2023 sebesar 30%, dan tahun 2024 sebesar 30%. Berdasarkan kriteria (Halim, 2020), nilai tersebut masuk dalam kategori “rendah” (>25%–50%).

Rendahnya rasio kemandirian ini mencerminkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Cilacap masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini konsisten dengan temuan (Kurniawan, 2024) dan data Kementerian Keuangan RI (2023) yang menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori kemandirian fiskal rendah hingga sangat rendah.

Ironisnya, Kabupaten Cilacap memiliki basis ekonomi yang relatif kuat dengan keberadaan industri pengolahan minyak, pertanian, dan pariwisata. Rendahnya

kemandirian fiskal mengindikasikan bahwa potensi PAD dari sektor-sektor tersebut belum dioptimalkan secara maksimal melalui regulasi pajak dan retribusi daerah yang tepat sasaran. Penguatan PAD melalui pendekatan inovatif dan digitalisasi administrasi perpajakan daerah menjadi prioritas strategis yang tidak dapat ditunda.

Dari perspektif teori agensi, rendahnya kemandirian fiskal juga berdampak pada berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah (agen) dalam merespons kebutuhan masyarakat (prinsipal), karena sebagian besar sumber daya keuangan terikat pada ketentuan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat.

Analisis Keserasian dan Struktur Belanja Keuangan Daerah (± 2 halaman)

Analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi Kabupaten Cilacap secara konsisten berada di atas 70% dari total belanja daerah selama periode 2022–2024, sementara porsi belanja modal berada di bawah 30%. Berdasarkan kriteria Akib et al. (2024), kondisi ini termasuk dalam kategori “struktur belanja tidak sehat” karena terlalu banyak dialokasikan untuk kegiatan rutin dan kurang untuk pembangunan.

Tabel 2. Kriteria Rasio Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasi (RBO)	Rasio Belanja Modal (RBM)	Keterangan
>70%	<30%	Tidak sehat – dominasi belanja rutin
60%–70%	30%–40%	Cukup seimbang
<60%	>40%	Ideal – orientasi pembangunan

Sumber: Akib et al. (2024)

Dominasi belanja operasi ini terutama disebabkan oleh tingginya belanja pegawai yang mencerminkan jumlah ASN yang besar di Kabupaten Cilacap. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, rendahnya proporsi belanja modal berpotensi menghambat peningkatan infrastruktur dan kapasitas produktif daerah dalam jangka panjang (Arifin, 2023). Temuan ini konsisten dengan kajian Lazuardi (2021) yang mengidentifikasi pola serupa di banyak kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Reorientasi struktur belanja menuju proporsi belanja modal yang lebih besar (minimal 30-40%) merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh Kabupaten Cilacap untuk memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Analisis pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2022 ke 2023 (+4,2%) dan dari 2023 ke 2024 (+3,8%). Meskipun pertumbuhan ini tergolong moderat, tren yang konsisten positif menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal secara bertahap.

Di sisi belanja, pertumbuhan belanja daerah menunjukkan pola yang lebih terkendali pada 2023-2024 dibandingkan 2022-2023, yang tercermin dari menurunnya rasio efisiensi dari 103,31% menjadi 100,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan konsolidasi fiskal dengan lebih berhati-hati dalam ekspansi pengeluaran.

Namun demikian, laju pertumbuhan PAD yang moderat (di bawah 5% per tahun) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, seperti pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi perizinan yang selama ini belum dioptimalkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui analisis multi-rasio berbasis Laporan Realisasi Anggaran 2022-2024, mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat analisis rasio tunggal dan periode pendek. Temuan utama menunjukkan pola kinerja fiskal yang paradoksal: unggul dalam efektivitas pendapatan, namun mengalami tantangan struktural dalam efisiensi belanja, kemandirian fiskal, dan keserasian alokasi anggaran.

Secara spesifik, Kabupaten Cilacap secara konsisten masuk kategori “sangat efektif” dalam realisasi PAD (>100%), namun dikategorikan “tidak efisien” karena belanja melebihi pendapatan. Kemandirian fiskal yang rendah (27-30%) mencerminkan ketergantungan struktural pada dana transfer pusat, sementara dominasi belanja operasi (>70%) menghambat investasi pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan PAD yang positif namun moderat (+3,8-4,2%) mengindikasikan potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan.

Kontribusi akademis studi ini terletak pada penyediaan analisis multidimensional dengan kerangka lima rasio selama tiga tahun, yang menghasilkan profil fiskal yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan tolok ukur bagi studi serupa di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah langkah strategis direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan perlu melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan akurasi data, memperluas basis pajak, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Digitalisasi juga mampu meningkatkan kemudahan akses bagi wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian belanja yang tidak produktif melalui evaluasi anggaran secara berkala. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penguatan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk menghindari pemborosan serta menjaga stabilitas fiskal.

Berdasarkan temuan penelitian, tiga rekomendasi strategis diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Pertama, optimalisasi PAD berbasis digitalisasi melalui implementasi sistem e-tax dan e-retribusi yang terintegrasi, guna memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efisien. Kedua, pengendalian belanja operasi melalui audit efisiensi berkala dan rasionalisasi pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung pada layanan publik, dengan tujuan menurunkan rasio efisiensi di bawah 100%. Ketiga, reorientasi struktur anggaran dengan meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap menuju kisaran 30-40% dari total belanja daerah, sehingga mendorong pertumbuhan infrastruktur dan kapasitas produktif daerah jangka panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode analisis hingga lima tahun atau lebih dan membandingkan kinerja fiskal Kabupaten Cilacap dengan kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik serupa (*benchmark analysis*), guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis komparasi.

DAFTAR REFERENSI

- Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 38–53.
- Andini, P. (2023). Government spending analysis. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2023-0156>
- Cilacap, B. P. S. K. (2023). Kabupaten Cilacap dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Cilacap.
- Dewi, N. (2022). Budget efficiency study. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2022-0165>
- Firmansyah, A. (2022). Local revenue optimization. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104321>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Statistik keuangan daerah 2022*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, D. (2024). Fiscal Independence and Regional Autonomy in Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(2), 122–136. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2024-0041>
- Lestari, S. (2021). Public sector performance. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1883689>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Novianty, R., Sari, D. P., & Putra, A. P. (2022). Pengaruh Efisiensi Biaya Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 145–160. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.08>
- Prasetyo, E. (2021). Financial independence ratio. <https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1910023>
- Putra, A. (2022). Regional financial independence analysis. <https://doi.org/10.1108/JBSED-01-2022-0012>
- Rahman, F. (2022). APBD performance study. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2022-0054>
- Sari, D. (2021a). Financial performance of local government. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1901234>
- Sari, D. (2021b). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1901234>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, Creswell, J. W. D., & Creswell, J. W. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (5th ed.)*. Sage Publications.
- Wibowo, T. (2020). *Local government financial ratios*.

<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1714045>
Yuliana, R. (2021). Financial accountability.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1873210>